

Received : 15 jan 2025
Accepted : 15 jan 2025
Published : 10 feb 2025

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM SABILULUNGAN RAKSA
DESA OLEH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD)
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2021 DI KABUPATEN
BANDUNG**

Iham Widodo¹
Dadan Kurnia²
Danny Permana³

1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani
iampasi3pers@gmail.com

Abstrak

Tujuan utama pembangunan nasional di Indonesia yaitu menciptakan keadilan, era globalisasi yang meluas di setiap aspek kehidupan. Setiap individu harus memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Kemampuan tersebut merupakan modal utama yang harus dipenuhi, utamanya karena pembangunan nasional yang mengedepankan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di segala bidang.

Penelitian dalam tesis ini berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Sabilulungan Raksa Desa Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 di Kabupaten Bandung” diangkat karena pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program sabilulungan Raksa Desa dinilai belum terlaksana dengan optimal.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori mengenai pemberdayaan yang dikemukakan oleh Kartasasmita (Noor, 2011:104-105) dengan indikator yang meliputi penciptaan suasana yang mendukung (*enabling*), langkah nyata dalam upaya memperkuat potensi (*empowering*); melindungi dan membela kepentingan masyarakat (*protecting*). Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data diantaranya wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan utama ialah Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung, Kepala Bidang Kepala Bidang

Received : 15 jan 2025
Accepted : 15 jan 2025
Published : 10 feb 2025

Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Desa, dan Kepala Desa Cileunyi Kulon, Desa Cisondari, dan Desa Ciburial.

Penelitian ini menggunakan pendekatan dan metode metode kualitatif. Pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penyusunan laporan penelitian ini adalah menggunakan wawancara, observasi lapangan dengan pendekatan deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, peneliti dapat menjelaskan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau yaitu tanpa membuat perbandingan. Berupa menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, di mana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam dengan analisis deskriptif, asumsi, dan teori.

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa proses perencanaan di tingkat kecamatan maka Tim Pembina Kegiatan merancang agenda kegiatan, kemudian melakukan pengecekan administrasi agar sesuai dengan tempat tujuan kegiatan PSPM Raksa Desa serta menyampaikan petunjuk sistem terkait praktik kegiatan PSPM Raksa Desa yang berdasarkan RPJMDesa dan RKPDesa masing-masing yang ada di Kabupaten Bandung. Pelaksanaan PSPM Raksa Desa di tingkat Kabupaten pastinya dimulai dari sosialisasi kepada Pemerintah Desa dan Pembina Kecamatan dengan pemerintah Desa sebagai penyelenggara program dan merumuskan perencanaan, Kabupaten merupakan pihak dalam pemberian bantuan penyelenggaraan program, serta melibatkan swadaya masyarakat sekitar dalam pembangunan tersebut. Bentuk kepemimpinan dalam pemerintah Desa dalam penyelenggaraan program pembangunan tersebut yaitu pemerintah Desa selalu memantau langsung terhadap pembangunan fasilitas masyarakat desa, dan pemerintah memotivasi masyarakat dalam penyelenggaraan program tersebut untuk menghimpun partisipasi masyarakat menjadi prioritas utama dalam sebuah pembangunan, dengan adanya partisipasi masyarakat.

Dalam penciptaan suasana yang mendukung (*enabling*), untuk memulai proses perencanaan di tingkat kecamatan maka Tim Pembina Kegiatan merancang agenda kegiatan, kemudian melakukan pengecekan administrasi agar sesuai dengan tempat tujuan kegiatan PSPM Raksa Desa serta menyampaikan petunjuk sistem terkait praktik kegiatan PSPM Raksa Desa yang berdasarkan RPJMDesa dan RKPDesa masing-masing yang ada di Kabupaten Bandung. komponen sumber daya menjadi komponen yang krusial dalam pelaksanaan pemberdayaan. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah aparatur, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplemetasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat

Received : 15 jan 2025
Accepted : 15 jan 2025
Published : 10 feb 2025

diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Program Raksa Desa di Kabupaten Bandung dijelaskan mengenai Pembiayaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa. Bersumber dari APBD Kabupaten Bandung.

Kata Kunci: *Pemberdayaan Masyarakat, Program Raksa Desa, Pembangunan Infrastruktur.*

Abstract

The main objective of national development in Indonesia is to create justice, an era of globalization that is widespread in every aspect of life. Every individual must have quality human resources (HR) in the implementation of national development. This ability is the main capital that must be met, especially because national development prioritizes community participation in the development process in all fields.

The research in this thesis entitled "Community Empowerment Through the Sabilulungan Raksa Desa Program by the Community and Village Empowerment Service (DPMD) based on Regent Regulation Number 23 of 2021 in Bandung Regency" was raised because the implementation of community empowerment through the Sabilulungan Raksa Desa program was considered not to have been implemented optimally.

The theory used in this study is the theory of empowerment put forward by Kartasasmita (Noor, 2011: 104-105) with indicators including the creation of a supportive atmosphere (enabling), real steps in efforts to strengthen potential (empowering); protecting and defending the interests of the community (protecting). The research method used is a qualitative approach with data collection methods including interviews, observations, and documentation, with the main informants being the Secretary of the Community and Village Empowerment Service of Bandung Regency, Head of the Village Planning Facilitation Division, and the Head of Cileunyi Kulon Village, Cisondari Village, and Ciburial Village.

This study uses a qualitative approach and method. Data collection that will be carried out in the preparation of this research report is using interviews, field observations with a descriptive approach. By using a descriptive approach, researchers can explain the reality of the events being studied or without making comparisons. In the form of describing events or

Received : 15 jan 2025
Accepted : 15 jan 2025
Published : 10 feb 2025

phenomena according to what happens in the field, where the data produced is in the form of written or spoken words from people and observable behavior. In addition, researchers intend to understand the social situation in depth with descriptive analysis, assumptions, and theories. Based on the results of this study, it was found that the planning process at the sub-district level, the Activity Supervisory Team designed the activity agenda, then carried out administrative checks to ensure that it was in accordance with the destination of the PSPM Raksa Desa activity and provided system instructions related to the practice of PSPM Raksa Desa activities based on the respective RPJMDesa and RKPDesa in Bandung Regency.

The implementation of PSPM Raksa Desa at the Regency level certainly begins with socialization to the Village Government and Sub-district Supervisors with the Village government as the program organizer and formulating the planning, the Regency is the party in providing assistance for implementing the program, and involving the local community's self-reliance in the development. The form of leadership in the Village government in implementing the development program is that the Village government always directly monitors the construction of village community facilities, and the government motivates the community in implementing the program to collect community participation as a top priority in development, with community participation. In creating an enabling atmosphere, to start the planning process at the sub-district level, the Activity Supervisory Team designs an activity agenda, then carries out administrative checks to ensure that it is in accordance with the destination of the PSPM Raksa Desa activity and provides system instructions related to the practice of PSPM Raksa Desa activities based on the respective RPJMDesa and RKPDesa in Bandung Regency.

The resource component is a crucial component in implementing empowerment. This resource component includes the number of personnel, expertise of the implementers, relevant and sufficient information to implement policies and fulfillment of related resources in program implementation, the authority that ensures that the program can be directed as expected, and the availability of supporting facilities that can be used to carry out program activities such as funds and infrastructure. In the Regulation of the Regent of Bandung Regency Number 23 of 2021 concerning Guidelines for the Implementation of Financial Assistance for the Raksa Desa Program in Bandung Regency, it is explained about the Financing of the Raksa Desa Community Empowerment Sabilulungan Program. Sourced from the Bandung Regency APBD.

Keywords: Community Empowerment, Raksa Desa Program, Infrastructure Development.

Received : 15 jan 2025
Accepted : 15 jan 2025
Published : 10 feb 2025

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah proses yang dilakukan secara sadar dan berkelanjutan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Menurut Digdowiswsio (2019) bahwa pembangunan dapat diartikan sebagai `suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi, yang pada dasarnya pembangunan menekankan pada perubahan, kemajuan, pertumbuhan, dan modernisasi. Kemudian dalam hakekatnya pembangunan merupakan usaha sadar manusia untuk mengubah keseimbangan dari tingkat kualitas yang dianggap kurang baik ke keseimbangan baru pada tingkat kualitas yang dianggap lebih tinggi, sehingga dapat diartikan bahwa tujuan pembangunan adalah pemerataan dalam mensejahterakan rakyat, di negara berkembang perhatian utama pembangunan terfokus pada dilema antara pertumbuhan dan pemerataan.

Tujuan utama pembangunan nasional di Indonesia yaitu menciptakan keadilan, era globalisasi yang meluas di setiap aspek kehidupan. Setiap individu harus memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Kemampuan tersebut merupakan modal utama yang harus dipenuhi, utamanya karena pembangunan nasional yang mengedepankan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di segala bidang.

Riggs (Engkus, 2017) menyatakan bahwa ekologi menggambarkan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekologi administrasi merupakan suatu proses yang dimana bertujuan dalam memecahkan masalah yang ada di masyarakat melalui pembangunan, perbaikan baik pada bidang sumber daya manusia ataupun organisasi sehingga terjadi pula proses timbal balik. Ekologi pemerintahan sendiri merupakan proses saling memengaruhi sebagai akibat adanya hubungan *normative* secara total dan timbal balik antara lembaga tinggi Negara maupun pemerintah, vertical-horizontal dan masyarakatnya. Dalam proses pemerintahan tidak lepas

Received : 15 jan 2025

Accepted : 15 jan 2025

Published : 10 feb 2025

keterkaitannya dengan masyarakat, sehingga dapat dikatakan aktor-aktor yang terlibat adalah pemerintah dan masyarakat.

Keberhasilan dari suatu pembangunan nyatanya tidak terlepas dari peran pemerintah maupun masyarakat yang saling melakukan kerjasama demi kemajuan daerahnya. Tujuan dari pembangunan nasional di Indonesia yaitu untuk menciptakan kesejahteraan, kemandirian serta keadilan bagi masyarakat. Peran pemerintah sebagai lini terdepan untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan di daerah harus bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan demi tercapainya tujuan nasional tersebut. Berbagai program dalam rangka peningkatan pembangunan fisik telah dilaksanakan pemerintah. Namun dalam kenyataannya justru menghasilkan kondisi yang kurang menguntungkan, misalnya tidak tepat sasaran, melemahkan kapital sosial yang ada di masyarakat, seperti nilai-nilai kegotong-royongan, kepedulian, musyawarah dan keswadayaan. Tetapi, dalam kenyataannya banyak sekali terdapat kesalahan-kesalahan yang kurang menguntungkan seperti lemahnya capital sosial dan tidak tepat sasaran. Lemahnya partisipasi masyarakat pada gilirannya juga mendorong pergeseran perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan, dan kepedulian untuk mengatasi persoalan mereka secara bersama.

Konsep otonomi daerah dibuat agar daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Jika dikaitkan dengan konsep pembangunan, bahwa pemerintah daerah juga berfungsi dalam memprakarsai pembangunan di daerah. Sebagaimana kita ketahui bahwa hakekat pembangunan adalah transformasi atau perubahan dari suatu kondisi tertentumenuju suatu kondisi yang lebih baik. Konteks kesejahteraan sosial pembangunan berarti upaya untuk memperbaiki/meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Bandung merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Jawa Barat. Dengan luas wilayah 1.767,96 KM². Terbagi dalam 31 kecamatan, 270

Received : 15 jan 2025

Accepted : 15 jan 2025

Published : 10 feb 2025

desa dan 10 kelurahan. Sebagian besar wilayah yang ada di Kabupaten Bandung ini merupakan wilayah pedesaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan dan metode metode kualitatif. Pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penyusunan laporan penelitian ini adalah menggunakan wawancara, observasi lapangan dengan pendekatan deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, peneliti dapat menjelaskan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau yaitu tanpa membuat perbandingan. Berupa menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, di mana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam dengan analisis deskriptif, asumsi, dan teori.

Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *human instrument*, yaitu peneliti itu sendiri. Utuk dapat menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksikan situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.

KERANGKA PEMIKIRAN

Di Kabupaten Bandung, kondisi masyarakat yang ada di beberapa desa belum sepenuhnya memiliki rumah layak huni dan fasilitas sanitasi yang baik. Tidak hanya itu, pada saat musim kemarau masyarakat sering sekali mengalami kekurangan air bersih yang diakibatkan karena minimnya ketersediaan air bersih.

Masalah lain adalah rendahnya partisipasi dan kepedulian masyarakat Kabupaten Bandung dengan kebijakan dan program-program yang dibuat pemerintah untuk Kabupaten Bandung yang

Received : 15 jan 2025
Accepted : 15 jan 2025
Published : 10 feb 2025

lebih baik. Masyarakat memiliki sikap tidak peduli terhadap program pemerintah, dan kebanyakan masyarakat desa masih pasrah akan kebijakan pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan selama masyarakat tidak merasa dirugikan hal ini terjadi khususnya di desa. Kurangnya partisipasi ini juga dapat disebabkan oleh tingginya rasa ketergantungan masyarakat kepada pemerintah.

Namun disatu sisi, pembangunan desa yang terlalu bertumpu pada alokasi dan distribusi dana yang sentralistik, akan mengurangi kreativitas dan komitmen masyarakat desa, kurang menimbulkan pembangunan yang berdasarkan kepercayaan diri dan menimbulkan dependensi masyarakat yang terlalu besar pada pemerintah. Masyarakat yang kurang berpartisipasi dan terlalu bergantung kepada pemerintah dapat menghambat perkembangan masyarakat itu sendiri. Program Raksa Desa menginginkan adanya perguliran dana bantuan, karena apabila dana pinjaman tersebut bergulir maka akan menimbulkan *spillover effect* sehingga semakin banyak masyarakat miskin yang mendapat bantuan melalui program ini.

Upaya pemberdayaan sebagai keberlanjutan dari pendayagunaan potensi, pemafaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memiliki sesuatu yang bermanfaat. Dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pilihan-pilihan. Oleh karenanya pemerintah daerah diharapkan mampu untuk mengatur sendiri masyarakat pra sejahtera. Namun dalam pelaksanaannya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) belum mencapai hasil yang efektif dalam menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Selain itu, berkaitan dengan penciptaan suasana yang dipengaruhi oleh belum maksimalnya upaya memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. Selain itu dalam melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah yang berjalan belum efektif terbukti karena masih

Received : 15 jan 2025

Accepted : 15 jan 2025

Published : 10 feb 2025

tingginya angka masyarakat prasejahtera di Kabupaten Bandung. Tentunya perlu adanya peningkatan pendekatan pemberdayaan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang sejalan dengan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung, demokratis dan pembelajaran social, Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah (*grass root*) yang dengan segala keterbatasannya belum mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan, sehingga pemberdayaan masyarakat tidak hanya penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosial yang ada. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, tanggung jawab adalah bagian penting dalam upaya pemberdayaan.

PEMBAHASAN

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Sabilulungan Raksa Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 di Kabupaten Bandung

Beberapa pembangunan yang selalu dirumuskan dalam suatu kebijakan ekonomi dalam banyak hal membuktikan keberhasilan, seperti yang terjadi di beberapa negara seperti Singapura, Australia dan lain sebagainya. Kebijakan ekonomi di negara tersebut umumnya menggunakan aspek sosial lingkungan yang didukung oleh mekanisme politik sehingga tercipta kebijakan ekonomi yang transparan. Dalam aspek sosial, pemerintah mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan juga lembaga sosial yang fungsinya ditingkatkan. Kemudian dalam aspek lingkungan pemerintah mengedepankan pemberdayaan atau pemeliharaan terhadap lingkungan manusia untuk kedepannya.

Received : 15 jan 2025
Accepted : 15 jan 2025
Published : 10 feb 2025

Dalam perspektif ini, desa dapat dilihat sebagai organisasi dimana semua elemen memiliki peran sesuai porsi masing-masing. Artinya, dari elemen terkecil desa yakni masyarakat hingga elemen struktural yakni pemerintah desa memiliki perannya masing-masing dalam membangun desa sebagai organisasi. Seperti halnya tahapan yang ada dalam kebijakan publik, dalam pembangunan sendiri juga terdapat 3 (tiga) tahapan utama yakni perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Maka dalam penganalisisan data ini, peran pemerintah-masyarakat akan dijelaskan ke dalam tiga bagian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

Dalam kerangka ini upaya untuk memberdayakan masyarakat (*empowering*) dapat dikaji dari 3 (tiga) aspek: Pertama, *Enabling* yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Kedua, *Empowering* yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. Ketiga, *Protecting* yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Pendekatan pemberdayaan pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung, demokratis dan pembelajaran sosial. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah (*grass root*) yang dengan segala keterbatasannya belum mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan, sehingga pemberdayaan masyarakat tidak hanya penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosial yang ada. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, tanggung jawab adalah bagian penting dalam upaya pemberdayaan.

Penciptaan Suasana yang Mendukung (*Enabling*)

Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2017 berisi tentang bagaimana proses dilaksanakannya Program Sabilulungan yang diawali dengan perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan,

Received : 15 jan 2025
Accepted : 15 jan 2025
Published : 10 feb 2025

pengawasan dan evaluasi. Terdapat beberapa tingkatan dalam perencanaan itu sendiri yaitu tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

Proses pelaksanaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa dijelaskan oleh Kepala Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung, sebagai berikut:

- a) Melakukan tahap sosialisasi dengan pihak Desa dan Kecamatan
- b) Mengumpulkan aspirasi masyarakat yang membutuhkan bantuan dan menargetkan sasaran yang ingin diperoleh
- c) Apabila telah ditetapkan, selanjutnya mencairkan dana yang akan disalurkan melalui keputusan Bupati
- d) Ketika dana sudah cair, seluruh proses pelaksanaan program dipantau dan dimintai laporan kegiatannya secara berkala.

Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Program Raksa Desa di Kabupaten Bandung terdapat tahapan dalam perencanaan di tingkat desa, yaitu:

- a) Untuk menyampaikan seberapa besar biaya yang digunakan dalam kegiatan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa maka dilaksanakan musyawarah desa penetapan pelaksanaan kegiatan oleh RT, RW, pengurus LPMD, dan anggota BPD;
- b) Terdapat beberapa agenda dari musyawarah desa tersebut;
- c) Menyampaikan pembiayaan kegiatan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa yang didapatkan oleh desa;
- d) Menyusun dan memutuskan TPKD;
- e) Membentuk panitia yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota sebanyak 5 (lima) orang yang berada dibawah tanggungan TPKD untuk kegiatan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa;

Received : 15 jan 2025

Accepted : 15 jan 2025

Published : 10 feb 2025

- f) Harus berdasarkan RPJMDesa dan RKPDesa apabila akan mengajukan kegiatan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa.

Untuk memulai proses perencanaan di tingkat kecamatan maka Tim Pembina Kegiatan merancang agenda kegiatan, kemudian melakukan pengecekan administrasi agar sesuai dengan tempat tujuan kegiatan PSPM Raksa Desa serta menyampaikan petunjuk sistem terkait praktik kegiatan PSPM Raksa Desa. Proses selanjutnya di tingkat Kabupaten.

Langkah Nyata dalam Upaya Memperkuat Potensi (*Empowering*)

Penyelenggara program yang dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan bupati dimana penyelenggaraan pembangunan MCK dan pipanisasi air yaitu pemerintah Desa sebagai penyelenggara program dan merumuskan perencanaan, Kabupaten merupakan pihak dalam pemberian bantuan penyelenggaraan program, serta melibatkan swadaya masyarakat sekitar dalam pembangunan tersebut.

Langkah nyata dalam pelaksanaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa dimulai dari tingkat kabupaten, selanjutnya ke tingkat kecamatan, pada akhirnya di tingkat desa. Pelaksanaan PSPM Raksa Desa di tingkat Kabupaten pastinya dimulai dari sosialisasi kepada Pemerintah Desa dan Pembina Kecamatan.

Semua proses pelaksanaan diawali dengan tahap sosialisasi dengan pihak dari Desa dan Kecamatan. Sosialisasi adalah proses pemberian informasi, pengadaptasian, penyesuaian, pengenalan dan penjabaran program kegiatan pokok organisasi sehingga kegiatan organisasi dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan aturan-aturan atau instruksi-instruksi yang diberikan. Sosialisasi dilakukan dengan harapan terbangunnya persepsi visi dan misi organisasi, yang ditandai dengan tingkat pelaksanaan program pada kegiatan-kegiatan yang mampu

Received : 15 jan 2025
Accepted : 15 jan 2025
Published : 10 feb 2025

melibatkan semua unsur organisasi dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan tujuan organisasi secara keseluruhan.

Melindungi dan Membela Kepentingan Masyarakat (*Protecting*)

Pada awalnya Program Raksa Desa diselenggarakan dengan maksud untuk mempercepat pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan cara memberdayakan pemerintah dan masyarakat desa melalui pendayagunaan sumberdaya lokal secara mandiri dan sumberdaya pembangunan secara optimal. Sehingga tujuan yang ingin dicapai program ini adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur perdesaan serta meningkatkan perekonomian masyarakat perdesaan melalui penyediaan permodalan bagi kelompok usaha ekonomi masyarakat.

Bentuk kepemimpinan dalam pemerintah Desa dalam penyelenggaraan program pembangunan tersebut yaitu pemerintah Desa selalu memantau langsung terhadap pembangunan MCK dan Pipanisasi air, dan pemerintah memotivasi masyarakat dalam penyelenggaraan program tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Dalam penciptaan suasana yang mendukung (*enabling*), untuk memulai proses perencanaan di tingkat kecamatan maka Tim Pembina Kegiatan merancang agenda kegiatan, kemudian melakukan pengecekan administrasi agar sesuai dengan tempat tujuan kegiatan PSPM Raksa Desa serta menyampaikan petunjuk sistem terkait praktik kegiatan PSPM Raksa Desa yang berdasarkan RPJMDesa dan RKPDesa masing-masing yang ada di Kabupaten Bandung. komponen sumber daya menjadi komponen yang krusial dalam pelaksanaan pemberdayaan.

Received : 15 jan 2025
Accepted : 15 jan 2025
Published : 10 feb 2025

Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah aparatur, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplemetasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diaharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Program Raksa Desa di Kabupaten Bandung dijelaskan mengenai Pembiayaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa. Bersumber dari APBD Kabupaten Bandung.

- 2) Dalam langkah nyata upaya memperkuat potensi (*empowering*) dimulai dari tingkat kabupaten, selanjutnya ke tingkat kecamatan, pada akhirnya di tingkat desa. Pelaksanaan PSPM Raksa Desa di tingkat Kabupaten pastinya dimulai dari sosialisasi kepada Pemerintah Desa dan Pembina Kecamatan. Pemerintah Desa sebagai penyelenggara program dan merumuskan perencanaan, Kabupaten merupakan pihak dalam pemberian bantuan penyelenggaraan program, serta melibatkan swadaya mayarakat sekitar dalam pembangunan tersebut. Swadaya masyarakat tidak hanya berbentuk uang saja, namun sesuai dengan peraturan bupati diatas bahwa swadaya masyarakat dilakukan dengan tenaga. Program Raksa Desa yang ada di Kabupaten Bandung meliputi pembangunan/pengembangan sarana air bersih yang menjadi kewenangan desa, pembangunan/pengembangan MCK sesuai standar teknis yang ditetapkan pemerintah, pembangunan/pengembangan fasilitas prasarana lingkungan, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, serta pembangunan/pengembangan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu sesuai dengan ketentuan teknis. Pembangunan tersebut dipilih atas data kebutuhan masyarakat yang diterima pemerintah Desa yang diwujudkan dalam sebuah pembangunan sebagai upaya dalam berpartisipasi dan memberdayakan masyarakat.

Received : 15 jan 2025
Accepted : 15 jan 2025
Published : 10 feb 2025

- 3) Dalam Melindungi dan membela kepentingan masyarakat (*protecting*), Bentuk kepemimpinan dalam pemerintah Desa dalam penyelenggaraan program pembangunan tersebut yaitu pemerintah Desa selalu memantau langsung terhadap pembangunan fasilitas masyarakat desa, dan pemerintah memotivasi masyarakat dalam penyelenggaraan program tersebut. Partisipasi masyarakat menjadi prioritas utama dalam sebuah pembangunan, dengan adanya partisipasi masyarakat, maka pembangunan akan berlangsung dengan lancar atas bantuan masyarakat dan bantuan dana juga dari pemerintah. Mengingat nominal bantuan uang untuk bidang fisik ini hanya 40% dari total bantuan program Raksa Desa maka dalam pengerjaan bidang ditunjang dengan sumber dana penyertaan yang datangnya dari swadaya masyarakat, jenis swadaya masyarakat ini bisa berupa uang, sumbangan berupa bahan bangunan, atau bisa berupa bantuan tenaga kerja yang biasanya dilakukan secara bergotong royong. Manfaat dari rehabilitasi infrastruktur transportasi sangat terasa dalam meningkatkan kemudahan masyarakat untuk bekerja dan mencari nafkah dan aktivitas sosial lainnya. Mayoritas masyarakat menyatakan aksesibilitas transportasi menjadi lebih mudah setelah fasilitas infrastruktur dibangun, menjadi lebih mudah, walaupun terdapat kelompok masyarakat yang tempat tinggalnya menjadi tidak terpencil setelah dibangun infrastruktur penunjang sebagai hasil dari Program Raksa Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. (2013). *Teori-teori Pembangunan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ahmadi, Abu. (2003). *Psikologi Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Andi, Asnudin. (2005). *Manajemen Proyek Konstruksi*. Yogyakarta: Pembaharuan
- Anwas, M Oos. (2014). *Pemberdayaan di era Globalisasi*. Bandung: Alfabeta

Received : 15 jan 2025
Accepted : 15 jan 2025
Published : 10 feb 2025

- Bachrawi, Sanusi. (2004). *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Clutterbuck, David. (2003). *The Art of HRD: The Power of Empowerment*. Jakarta: Gramedia
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. (2015). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Effendi, Bachtiar. (2002). *Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan*. Yogyakarta: L. Uhaindo dan Offset
- Hakim, L. (2017). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang*. Jurnal Politikom Indonesiana, Vol 2, No (2)
- Hikmat, Harry. (2010). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat (Edisi Revisi)*. Bandung: Humaniora
- Kartasasmita, Koesnadi. (1997). *Administrasi Internasional*. Bandung: Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
- Kodoatie, Robert J. (2005). *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*. Yogyakarta: Andi Offset
- Marbun, BN. (2002). *Proses Pembangunan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Marzuki, M. (2004). *Pendekatan dan Proses Pembangunan Partisipatif*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri
- Noor, J. (2011). *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Alfabeta
- Nugroho, Iwan., Rokhim Dahuri. (2012). *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES
- Nurman. (2015). *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Prasojo, Rizky A., Luluk Fauziah. (2015). Peran Pemerintah-Masyarakat dalam Pembangunan Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Jurnal FISIP Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Vol 3, No (1)
- Razali, Muhammad Taufiq. (2023). Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Pangke Kecamatan Meral Kabupaten Karimun). Jurnal Kemunting, Vol 4, No (2)

Received : 15 jan 2025
Accepted : 15 jan 2025
Published : 10 feb 2025

- Sahyana, Yana. (2017). Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sukamulya Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, Vol 9, No (2)
- Sangian, Novita Iriyana., dkk. (2014). *Rancang Bangun E-Magazine Universitas Sam Ratulangi*. *Jurnal Teknik Informatika*, Vol 4, No (1)
- Sarundajang. (1999). *Arus Balik Kekuasaan Pusat dan Daerah*. Jakarta: Sinar Harapan
- Sayre, WS. (1998). *Ekologi Pemerintahan*. Jakarta: PT Pertja
- Shadily, Hassan. (1984). *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- Soleh, Chabib., Heru Rochmansjah. (2014). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media
- Sudarmono. (2007). *Implementasi Pendekatan Partisipatif Dalam Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Desa Samaulue Kabupaten Pinrang*. Makassar: Universitas Hasanuddin
- Sugiyono. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Suharto, Edi. (2006). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama
- Suharto, Edi. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama
- Sumaryadi, I Nyoman. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Citra Utama
- Sunarno, Siswanto. (2009). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indoensia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sutrisno, Basuki. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Teguh, Ambar Sulistiyani. (2004). *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media

Received : 15 jan 2025
Accepted : 15 jan 2025
Published : 10 feb 2025

Tjandra, Riawan. (2009). *Peradilan Tata Usaha Negara PTUN Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa*. Yogyakarta: Liberty

Wahyudin, Y. (2004). *Karakteristik Sumberdaya Pesisir dan Laut Kawasan Teluk Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi*. Bogor: IPB Press

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Program Raksa Desa di Kabupaten Bandung

Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Program Raksa Desa di Kabupaten Bandung